



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI.
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 17 Juni 2019.</b>
Pukul	: <b>19.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: <b>Ruang Rapat Komisi X DPR RI</b>
Pimpinan Rapat	: <b>Ir. H.A.R Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Evaluasi Daya Serap APBN Tahun 2018;</b> <b>2. Pelaksanaan dan Daya Serap Semester I APBN TA 2019;</b> <b>3. Pembahasan RKA/RKP-K/L Tahun 2020.</b>
Hadir	: 35 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Mohamad Nasir/Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul **19.47** WIB oleh **Ir. H.A.R Sutan Adil Hendra, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menristekdikti RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

**1. Realisasi daya serap APBN TA 2018**

Kemenristekdikti RI menyampaikan realisasi daya serap APBN TA 2018 adalah sebesar **91,36%** atau lebih tinggi dari daya serap APBN TA 2017 sebesar **89,19%**. Berikut rincian persentase daya serap APBN 2018 per-satuan kerja:

No	UNIT ORGANISASI/SATKER	Persentase Daya Serap APBN 2018
1	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan	96,20%
2	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti	86,50%
3	Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	81,80%
4	Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan	97,64%
5	Ditjen Penguatan Inovasi	95,42%
6	Sekretariat Jenderal	94,84%
7	Inspektorat Jenderal	94,50%
8	PTN dan LLDIKTI	91,43%
9	BP-PTNBH, Gaji PTN-LLDIKTI (Satker)	77,21%

Berikut rincian daya serap APBN 2018 per jenis belanja:

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Pegawai	14.626.438.956.000	13.280.875.215.715	90,8%
2	Belanja Barang	21.817.005.179.000	20.135.797.396.410	92,29%
3	Belanja Modal	7.137.574.614.000	6.120.933.623.976	85,76%
4	Belanja Bansos	3.744.845.100.000	3.700.381.979.799	98,81%
TOTAL		47.325.683.849.000	43.237.988.215.900	91,36%

## 2. Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2019

Kemenristekdikti RI menyampaikan pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2019 per-12 Juni 2019 adalah sebesar **33,76%**. Berikut rincian persentase daya serap APBN 2019 kwartal I per satuan kerja:

No	UNIT ORGANISASI	Persentase Daya Serap APBN 2018
1	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan	38%
2	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti	25,7%
3	Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	31,6%
4	Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan	65%
5	Ditjen Penguatan Inovasi	32,4%
6	Sekretariat Jenderal	45,8%
7	Inspektorat Jenderal	44,2%
8	PTN dan LLDIKTI	30,1%

Beberapa program yang sedang/belum terlaksana antara lain:

- a. Realisasi anggaran Beasiswa Bidikmisi mencapai **44,85%**.
- b. Realisasi anggaran Beasiswa Adik mencapai **31,62%**.
- c. Belum ada realisasi anggaran Beasiswa PPA karena sedang dalam proses pencairan.
- d. Realisasi anggaran Program Revitalisasi Pendidikan Vokasi mencapai **8,31%**.
- e. Realisasi anggaran Program Pembinaan PTS mencapai **1,6%**.
- f. Realisasi anggaran Beasiswa S3 Dosen mencapai **45%**.
- g. Realisasi anggaran BOPTN Penelitian sebesar **78%**.
- h. Realisasi anggaran Program *Teaching Industry* sebesar **22,48%**.
- i. Realisasi anggaran Program CPPBT di PT sebesar **47,07%**.

### 3. Pembahasan RKA/RKP-K/L Tahun 2020:

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan RI Nomor S-338/MK.02/2019 dan Nomor B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2020 tanggal 29 April 2019, Kemenristekdikti RI mendapatkan pagu indikatif RAPBN TA 2020 sebesar **Rp39.721.231.542.000,-** (*tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*), yang didalamnya terdapat anggaran fungsi pendidikan sebesar **Rp39.006.188.911.000,-** (*tiga puluh sembilan triliun enam miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah*). Berikut usul pagu indikatif 2020 Kemenristekdikti RI:

NO	UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PAGU ANGGARAN 2020
1	Sekretariat Jenderal	Layanan Umum (Ristek)	85.178.598.000
		Pendidikan	29.352.231.245.000
2	Inspektorat Jenderal	Layanan Umum (Ristek)	-
		Pendidikan	40.498.457.000
3	Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti	Layanan Umum (Ristek)	72.493.012.000
		Pendidikan	105.787.535.000
4	Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Layanan Umum (Ristek)	-
		Pendidikan	4.314.457.551.000
5	Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti	Layanan Umum (Ristek)	200.779.500.000
		Pendidikan	3.598.101.443.000
6	Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan	Layanan Umum (Ristek)	208.769.127.000
		Pendidikan	1.571.813.822.000
7	Ditjen Penguatan Inovasi	Layanan Umum (Ristek)	147.822.394.000
		Pendidikan	23.298.858.000
<b>TOTAL</b>		<b>LAYANAN UMUM (RISTEK)</b>	<b>715.042.631.000</b>
		<b>PENDIDIKAN</b>	<b>39.006.188.911.000</b>
<b>TOTAL KEMENRISTEKDIKTI</b>			<b>39.721.231.542.000</b>

### 4. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI:

- a. Komisi X DPR RI mengapresiasi atas realisasi daya serap APBN TA 2018 adalah sebesar **91,36%** lebih tinggi dari daya serap APBN TA 2017 sebesar **89,19%**. Selanjutnya, Komisi X DPR RI mendorong Kemenristekdikti RI untuk penyerapan anggaran dapat mencapai **sekurang-kurangnya 95%** dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.
- b. Komisi X DPR RI menilai bahwa daya serap kwartal I APBN TA 2019 Kemenristekdikti RI yang baru mencapai **33,76%** per tanggal 12 Juni 2019 belum optimal, dan meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan peta jalan perkembangan daya serap APBN TA 2019, lengkap dengan keterangan dan capaian program sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKA dan RKP Kemenristekdikti RI TA 2020.
- c. Komisi X DPR RI telah mengetahui bahwa Pagu Indikatif Kemenristekdikti RI pada RAPBN TA 2020 sebesar **Rp39.721.231.542.000,-** (*tiga puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh satu*

- juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*), mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pagu Indikatif Kemenristekdikti RI pada RAPBN TA 2019 sebesar **Rp42.276.305.053.000** (*empat puluh dua triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus lima juta lima puluh tiga ribu rupiah*). Hal ini harus diikuti dengan proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan secara terukur, terkontrol dan komprehensif.
- d. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk memberikan penjelasan dan data rinci mengenai hal-hal sebagai berikut:
- 1) Perlunya penambahan alokasi satuan dan sasaran beasiswa Bidik Misi dan Beasiswa PPA, baik untuk mahasiswa maupun dosen.
  - 2) Klarifikasi alokasi pagu anggaran pada APBN TA 2018 yang terjadi perbedaan antara hasil keputusan Raker 19 April 2017 sejumlah **Rp41.284.024.119.000** dengan bahan Raker hari ini (17 Juni 2019) yang menyebutkan pagu APBN TA 2018 sejumlah **Rp47.325.863.849.000**.
  - 3) Klarifikasi dan penjelasan rinci mengenai anggaran sarpras pada APBN TA 2019 yang dialokasikan Kemenristekdikti RI kepada Kemen PU PR RI.
  - 4) Arah dan kebijakan pengembangan pendidikan vokasi.
  - 5) Pengembangan dan pengelolaan LPTK sebagai perguruan tinggi yang memproduksi atau menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Dalam pembahasan RKP dan RKA Kemenristekdikti RI ke depan, Kemenristekdikti RI perlu menyajikan basis data yang digunakan, rujukan, target dan sasaran dalam penyusunan RKP dan RKA TA 2020, serta menyajikan review kendala, capaian program dan kegiatan mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebagai bahan rujukan penyusunan RKP dan RKA Kemenristekdikti RI tahun 2020.
- f. Berdasarkan Pasal 227 ayat (3) UU MD3, Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan APBN TA 2019, untuk menjadi salah satu bahan rujukan pembahasan RKP dan RKA Kemenristekdikti RI TA 2020.
- g. Komisi X DPR RI akan melakukan kajian dan pendalaman terhadap bahan yang disampaikan Kemenristekdikti RI hari ini, sebagai salah satu rujukan dalam pembahasan RKP dan RKA Kemenristekdikti RI TA 2020, setelah dibacakan nota keuangan APBN TA 2020 oleh Presiden RI pada sidang Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2019.

## 5. Lain-Lain

- a. Komisi X DPR RI dan Menristekdikti RI sepakat akan mengagendakan Pembahasan RKP-K/L dan RKA-K/L Tahun 2020 pada akhir Juni 2019 (*tentatif*), dengan agenda penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, organisasi, dan program kegiatan K/L sesuai hasil pembahasan Banggar pada Masa Sidang V Tahun 2018-2019.

- b. Komisi X DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk menyerahkan penjelasan atau jawaban atas seluruh pertanyaan, masukan dan tanggapan anggota Komisi X DPR RI secara tertulis paling lambat tanggal **26 Juni 2019**.

## II. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul **21.50** WIB